

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PASAR PADA KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

(Studi Kasus Pasar Alabio)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Pengajuan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH
HIDAYATI
NPM : 20.22.408**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama :

Nama : HIDAYATI
NPM : 2022408
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
PADA KABUPATEN HULU SUNGAU UTARA (Studi
Kasus Pasar Alabio)

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing
skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, Oktober 2025

Pembimbing I

Ni Made Musiyani Anjasmari, S.AP M.AP
NUPTK. 1635759660230282

Pembimbing II

Nurul Hasanah, S.Pd. M.M.
NUPTK. 3358765666230230



Ahmad Baihaqi, S. Sos, M.A.
NIK. 19921104 201509 1 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur peneliti atas kehadiran Allah SWT, Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga peneliti bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio) “ Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQnR., CIQaR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos. M.A. selaku Plt. Ketua Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Ibu Ni Made Musiyani Anjasmari, S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
4. Ibu Nurul Hasanah, S.Pd, MM. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis.
5. Seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang telah

memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.

6. Kepada orang tua serta keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan, perhatian, nasehat, semangat, dan dukungan kepada penulis.
7. Dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan proposal skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun sangatlah peneliti harapkan. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amuntai, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Tipe Penelitian.....	28
D. Data dan Sumber Data.....	29
E. Desain Operasional Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	34
H. Uji Kreadibilitas Data.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian-----	30
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian-----	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran-----	27
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan salah satu lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan/atau jasa. Pasar sendiri terbagi menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional biasanya ditandai dengan adanya transaksi tawar-menawar, harga yang relatif terjangkau, serta kedekatan hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Meskipun perkembangan pasar modern semakin pesat, pasar tradisional tetap memiliki peran yang penting, terutama sebagai penggerak ekonomi lokal serta sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Keberadaan pasar tradisional tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Di pasar tradisional, masyarakat tidak hanya melakukan transaksi, melainkan juga membangun interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas. Oleh sebab itu, keberlangsungan pasar tradisional sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaannya. Apabila pengelolaan pasar dilakukan secara profesional, tertib, dan sesuai aturan, maka pasar tradisional akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diminati masyarakat, meskipun harus bersaing dengan pasar modern.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pasar tradisional juga berperan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur, membina, serta

mengelola pasar agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat optimal. Guna mewujudkan tata kelola pasar yang tertib, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek mulai dari penyewaan lapak, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga larangan praktik-praktik yang dapat merugikan pedagang maupun masyarakat. Kehadiran regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kondisi ini dapat dilihat pada Pasar Alabio, salah satu pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beberapa fenomena yang muncul menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada Pasar Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara ditemukan fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyebabkan pedagang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai lokasi berjualan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, sebagian pedagang memilih berjualan di area luar gedung pasar karena dianggap lebih strategis. (Sumber: Observasi di lapangan)
2. Kurangnya tanggung jawab petugas kebersihan akibat lemahnya pengawasan dari pihak pengelola pasar menyebabkan pemeliharaan sarana

dan prasarana tidak berjalan optimal, dan SOP kebersihan tidak diterapkan dengan baik. Kondisi ini mencerminkan struktur birokrasi yang belum berfungsi secara efektif, sehingga pasar menjadi kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli, terlihat dari bangunan yang kotor dan toilet yang tergenang air. (Sumber: Observasi di lapangan)

3. Adanya praktik jual-beli hak sewa lapak disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pengelola pasar. Hak sewa yang seharusnya tidak boleh dipindahtangankan justru diperjualbelikan, hal ini menunjukkan kurangnya komitmen aparat dalam menegakkan aturan serta lemahnya integritas pelaksana dalam menjalankan tugas pengawasan. Di sisi lain, sebagian pedagang memilih jalan pintas dengan memperjualbelikan hak sewa, yang mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Akibatnya, harga lapak menjadi lebih tinggi daripada tarif resmi. (Sumber : Observasi di lapangan).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana regulasi tersebut telah diterapkan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya, serta dampaknya terhadap pedagang maupun masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pasar agar lebih efektif, tertib, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pokok-pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam suatu penelitian. Penerapan Fokus yang jelas dapat membantu peneliti membuat keputusan yang tepat dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio). Untuk memperjelas dan mempertajam penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40), menyebut implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio) ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio) ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada Pasar Alabio.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah tentang pengelolaan pasar, serta penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan rujukan bagi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menganalisis implementasi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pasar tradisional di daerah.
- b. Bagi pemerintah, Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan dan pengelola Pasar Alabio, dalam meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Krisna Adhi Azhari Zhaputera (2023) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan”**.

PKL yang menjamur di daerah Kabupaten Balangan dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan yang harus diimbangi dengan ketertaturan dan ketertiban, permasalahannya adalah PKL menggunakan badan jalan untuk berjualan, PKL yang menggunakan trotoar dan Kurang tegasnya tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan terhadap pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan metode diskriptif kualitatif pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan teknik penarikan informan menggunakan snowball sampling yang berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negative, dan mengadakan membercheck.

Dari hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan sudah baik dan ada terdapat 4 sub variabel yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi dan karakteristik dan kemampuan pelaksana yang dapat diuraikan menjadi 9 indikator, dimana 2 indikator belum baik seperti lingkungan sosio kultural dan Keterlibatan penerapan pedagang kaki lima dan 7 indikator sudah baik seperti koordinasi dan integrasi, kerjasama antar instansi, sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, struktur birokrasi, dan pola-pola hubungan. Faktor yang mempengaruhi implementasi adalah faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Faktor yang belum baik adalah lemahnya kesadaran pedagang kaki lima, kurangnya ketegasan aparat dalam menindak pelanggaran peraturan daerah sehingga terjadi adanya interaksi PKL dan pelaksana dan adanya fasilitas kerja petugas.

Oleh karena itu disarankan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan relokasi kepada pedagang kaki lima sehingga tertata rapi dan tidak mengganggu pada pengguna jalan setempat. Petugas harus tegas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan

peruntukan kawasan Pasar Paringin dan Pedagang kaki lima harus peduli terhadap lingkungannya disekitar dan keselamatan bagi mereka.

2. Aza Rizki Damayanti (2020) Ilmu Administrasi Negara Universitas Tidar. Penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang”**. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional di Pasar Rejowinangun Kota Magelang. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi Soren C. Winter yang terdiri dari 3 proses implementasi yaitu perilaku organisasi (*organization behavior*) dan perilaku antar organisasi (*interorganizational behavior*), perilaku birokrat tingkat bawah (*street-level bureaucracy behavior*) dan perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*). Hasil penelitian menunjukkan perilaku organisasi dan antar organisasi dilihat dari komitmen belum optimal yang disebabkan terbatasnya sumber daya finansial dan usaha yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil untuk meramaikan kembali Pasar Rejowinangun. Pada perilaku birokrat tingkat bawah dilihat dari diskresi menunjukkan tidak semua birokrat tingkat bawah mampu untuk melakukan diskresi. Sedangkan perilaku kelompok sasaran menunjukkan adanya respon negatif pedagang terkait sistem penempatan pedagang yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang dilakukan dan keadaan pasar tradisional yang sepi menyebabkan pedagang menutup sebagian tempat

usahanya serta beberapa dari pedagang tersebut bahkan belum memiliki Surat Izin Tempat Usaha.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau tindakan pemerintah untuk mengatur, melayani dan melindungi masyarakat. Menurut Dye dalam buku Ipik Permana (2023:4) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah.

Menurut Anderson dalam buku Ipik Permana (2023:4-5)

- 1) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.
- 2) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan.
- 3) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif, yaitu tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- 4) Kebijakan pemerintah sedikitnya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa

Menurut Rian Nugroho D. Dalam buku Sahya Anggara (2014:37-

38) Kebijakan publik bukan berarti mudah dibuat, mudah dilaksanakan dan mudah dikendalikan karena kebijakan publik menyangkut politik.

Dengan demikian, kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dalam buku Farid Wajdi dan Andryan (2022:6-7) kategori tentang kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan substantif versus Kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif tersebut dapat dijalankan.
- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori vs kebijakan redistributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan kepada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, kepemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sedangkan menurut Sholichin Abdul Wahab dalam buku Dewi dkk (2022:28-29) menjelaskan bahwa untuk memahami hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, dapat dilihat melalui beberapa kategori berikut:

1) Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu

hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

2) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

3) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

4) Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud nyata dari kebijakan publik yang dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

5) Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

c. *Proses Kebijakan Publik*

Ripley dalam buku Ida Syafriyani (2023:3-4) Tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu

a) Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.

b) Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki

tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

- c) Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.
- 2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan
 Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.
- 3) Tahap Implementasi Kebijakan
 Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.
- 4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, kinerja dan dampak kebijakan tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

2. Implementasi

Edward III dalam Reno Affrian (2023:27) Menjelaskan bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

Secara etimologis pengertian implementasi adalah: "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". (Sore & Sobirin, 2017:121)

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Uddin B.Sore dan Sobirin (2017:121) Adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Guntur Setiawan dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Menurut Hanifah Harsono dalam buku Suradi (2022:2) Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam buku Aziz Nuri Satriyawan dkk (2024:27) Implementasi ialah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

3. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Saktisya Putra et al., dalam buku Degdo Suparyitno dkk (2024:7) Implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan kebijakan yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. Keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wool dalam buku Alexander Phuk Tjilen (2019:24) Implementasi dari setiap kebijakan itu adalah birokrasi dan justru dalam implementasi itulah sesungguhnya suatu kebijakan diberi bentuk.

Menurut Hom dan Mater dalam buku Muhammad Bahmid Effendi Pulungan dkk (2024:14) Implementasi kebijakan publik diartikan

sebagai serangkaian tindakan pemerintah yang mengikuti keputusan sebelumnya.

b. Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model Donald Van Metter & Carl Van Horn

Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153) disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada 6 variabel, menurut van Metter & van Horn dalam buku Leo Agustino (2022:150-153), yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a) Ukuran dan tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dari tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran yang tersedia, maka akan

timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kuncuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agar pelaksanaan proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agar pelaksanaan semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap Atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) Menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect On Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan pandangan Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu :

Pertama adalah Komunikasi kebijakan. Faktor ini merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi atau (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi atau (*consistency*).

Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik dapat disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan sementara itu, dimensi kejelasan atau (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana agar sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), serta informasi dan kewenangan atau (*information and authority*).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu, dimensi sumber daya peralatan

merupakan sarana yang digunakan untuk operationalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya, dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksanaan kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus memiliki dedikasi pada kebijakan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan baik uang maupun bentuk apresiasi lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksanaan satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksanaan yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana, koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

3) Model Merilee S. Grindle

Merilee S. Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162), pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - (1) Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - (2) Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle dalam buku Leo Agustino (2022:159-162) juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

a) *Content of policy* menurut Grindle adalah :

- (1) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan berbagai kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- (2) *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- (3) *Exent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

- (4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- (5) *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapan demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

- (6) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber dan sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

- b) Context of Policy menurut Grindle adalah :

- (1) Power, interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

- (2) Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- (3) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menanggapi suatu kebijakan.

1. 4. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Menurut Harold koontz dan Cyril O'Donel dalam buku Saifuddin (2018:53) Mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.

Andrew F. Sikul dalam buku Saifuddin (2018:53) mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh

perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Menurut Sondang P. Siagian dalam buku Saifuddin (2018:53-54) pengelolaan dapat didefinisikan sebagai ‘kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain’. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

b. Asas Pengelolaan

Adapun asas pengelolaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pasal 2, yaitu sebagai berikut

- 1) Kemanusiaan;
- 2) Keadilan;
- 3) Kesamaan kedudukan;
- 4) Ketertiban dan kepastian hukum;
- 5) Kelestarian lingkungan
- 6) Kejujuran usaha; dan
- 7) Persaingan sehat (fairness)

c. Pengertian Pasar

Menurut KBBI dalam buku Elpisah (2022:159) pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli. Pasar merupakan sebuah tempat untuk kegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi atau perkumpulan dengan maksud untuk mencari laba. Dr. Winardi SE dalam buku Elpisah (2022:159) arti pasar adalah sebuah tempat dimana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli.

Menurut Kuntowijoyo dalam buku Siti Nurmayanti dkk (2024:116) Definisi pasar adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual.

William J. Stanton dalam buku Zulki Zulkifli Noor (2021:3) Pasar merupakan sekumpulan orang yang berkeinginan untuk memperoleh kepuasan menggunakan uang yang digunakan untuk membeli barang dan berkemauan untuk membelanjakan uang yang dipunyainya tersebut.

d. Penggolongan pasar

Kotler dan Armstrong dalam buku Siti Nurmayanti dkk (2024:116-117) Menggolongkan pasar kedalam beberapa kelompok, yaitu :

- 1) Pasar Konsumen
Pasar konsumen terdiri dari individu-individu dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi.
- 2) Pasar Bisnis
Dalam pasar bisnis di mana konsumen membeli barang dengan tujuan untuk diolah kembali atau diolah dalam tahap lanjut dan dapat digunakan dalam sebuah proses produksi.
- 3) Pasar Penjual
Di pasar penjual ini konsumen membeli barang dengan tujuan untuk dapat dijual kembali dengan harapan perolehan laba.
- 4) Pasar Pemerintah
Dalam pasar pemerintah dimana terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang membeli barang dan jasa untuk menghasilkan layanan terhadap publik dan atau memindahkan barang serta jasa agar dapat digunakan bagi yang membutuhkan.
- 5) Pasar Internasional
Pasar internasional memiliki daya cakup para pembeli (buyer) dari negara lain, termasuk konsumen, produsen, penjual dan pemerintah.

e. Jenis-jenis Pasar

Menurut Zulki Zulkifli Noor (2021) Jenis-jenis pasar di bedakan menjadi beberapa macam yaitu :

- 1) Jenis-jenis pasar Menurut Bentuk Kegiatan
Pasar dapat dibedakan dalam beberapa jenis menurut bentuk kegiatan, cara transaksi, waktu dan jenis barangnya. Adapun jenis pasar menurut bentuk kegiatannya adalah :
 - a) Pasar Nyata. Pasar ini menyediakan berbagai jenis barang yang biasanya memang diperjual belikan. Contohnya adalah pasar swalayan dan pasar tradisional.

- b) Pasar Abstrak. Pasar ini tidak dipenuhi oleh pedagang yang tawar menawar secara langsung dan bertransaksi secara langsung, para pelaku dalam pasar ini akan menggunakan surat dagangan saja tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Contohnya adalah pasar *online* dan pasar modal. (Noor, 2021:5)
- 2) Jenis-jenis pasar Menurut Cara Transaksi
 - a) Pasar Tradisional. Merupakan pasar di mana penjual dan pembelinya dapat saling tawar menawar secara langsung. Barang yang dijual biasanya berupa barang kebutuhan pokok keseharian.
 - b) Pasar Modern. Merupakan pasar yang bersifat modern dan menyediakan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang pas dan dilayani sendiri oleh konsumen tersebut. Pasar modern biasanya dapat anda temui dengan mudah di mal ataupun pusat-pusat perbelanjaan di sebuah kota.
- 3) Jenis-jenis pasar Menurut Jenis barang
 - a) Pasar Barang Konsumsi. Merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai macam barang yang memang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang manusia.
 - b) Pasar Sumber Daya Produksi. Merupakan suatu pasar yang menyediakan berbagai macam faktor-faktor produksi tertentu, seperti mesin-mesin, tenaga ahli, dan lain sebagainya.
- 4) Jenis-jenis pasar Menurut Waktu
 - a) Pasar harian. Diadakan setiap hari dan biasanya menjual berbagai macam barang kebutuhan konsumsi sehari-hari.
 - b) Pasar mingguan. Hanya diadakan seminggu sekali, biasanya terdapat di daerah yang penduduknya masih sangat jarang, misalnya pedesaan.
 - c) Pasar bulanan. Diadakan sebulan sekali di daerah-daerah tertentu. Contohnya adalah pasar hewan.
 - d) Pasar tahunan. Diadakan setahun sekali dan umumnya bersifat nasional. Contohnya adalah pasar pameran pembangunan dan pekan raya Jakarta.
 - e) Pasar temporer. Diselenggarakan dalam suatu waktu tertentu dan tidak rutin. Biasanya pasar ini diadakan guna merayakan suatu peristiwa tertentu, contohnya adalah bazar. (Noor, 2021:6)
- 5) Jenis-jenis pasar Menurut Keleluasaan Distribusi
 - a) Pasar Daerah

Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 daerah produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pasar daerah melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 daerah.

- b) Pasar Lokal
Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 kota tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan serta penawaran hanya dalam 1 kota.
- c) Pasar Nasional
Pasar yang membeli dan menjual produk di dalam 1 negara tempat produk tersebut dihasilkan. Dapat juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan serta penjualan di dalam negeri.
- d) Pasar Internasional
Pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauan dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contoh : Pasar kopi di Santos, Brazil.
- 6) Jenis-jenis pasar Menurut Dagangan
 - a) Pasar umum merupakan pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam.
 - b) Pasar khusus merupakan pasar yang memperjualbelikan satu jenis barang dagangan saja.
 - c) Pasar tempel merupakan jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, akan tetapi secara fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu.

5. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013

Adapun isi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 terkait fenomena masalah yaitu :

Fenomena 1 : Kurangnya sosialisasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM menyebabkan pedagang tidak mengetahui ketentuan yang berlaku, termasuk aturan mengenai lokasi berjualan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, sebagian pedagang memilih berjualan di area luar gedung pasar karena dianggap lebih strategis. (Sumber: Observasi di lapangan) Relevansi perda

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 21 Ayat (2) huruf d & h

1. membangun toko, kios dan los serta lapak/tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
2. menggelar barang dagangan di lokasi/tempat yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

1. Pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 14.
2. Pengawasan Pasar Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21.
3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pasar.
4. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Pasar dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Kesimpulan : Pasal 23 mewajibkan Dinas melakukan pembinaan & pengawasan, tetapi belum optimal karena pedagang tidak semua tahu aturan yang berlaku. Pasal 21 dilanggar karena pedagang berjualan di luar lokasi resmi.

Fenomena 2 : Kurangnya tanggung jawab petugas kebersihan akibat lemahnya pengawasan dari pihak pengelola pasar menyebabkan pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berjalan optimal, dan SOP kebersihan tidak diterapkan dengan baik. Kondisi ini mencerminkan struktur birokrasi yang belum berfungsi secara efektif, sehingga pasar menjadi kurang nyaman bagi pedagang maupun pembeli, terlihat dari bangunan yang kotor dan toilet yang tergenang air. (Sumber: Observasi di lapangan) Relevansi perda :

BAB IV PENATAAN PASAR DAERAH Pasal 12

- 1) Pembangunan dan revitalisasi Pasar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sesuai dengan standarisasi sarana prasarana dan jangka waktu yang ditetapkan.
- 2) Standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana dan prasarana primer, sekunder dan tersier.
- 3) Jangka waktu penyelesaian pembangunan dan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan menentukan satu fokus pasar.

Pasal 13

- 1) Sarana dan prasarana primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. toko, kios atau los dan lapak/tenda;
 - b. jalan dan gang;
 - c. saluran pembuangan air;
 - d. bak tempat pembuangan sampah organik dan anorganik;

- e. musholla di lokasi strategis;
 - f. kantor pasar;
 - g. toilet;
 - h. tempat cuci tangan;
 - i. penyediaan air bersih;
 - j. halaman dan tempat parkir kendaraan;
 - k. penyediaan instalasi listrik baik di toko, kios/los maupun di fasilitas umum pasar;
 - l. hydrant;
 - m. pos keamanan pasar;
 - n. tempat tera ulang; dan
 - o. taman dan penghijauan.
- 2) Sarana dan prasarana sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diantaranya seperti ruang asosiasi pedagang pasar dan tempat pemotongan hewan yang terpisah dari gedung pasar.
- 3) Sarana dan prasarana tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) seperti fasilitas lembaga keuangan

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP PASAR DAERAH Pasal 8 huruf a

menyediakan fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Kesimpulan : Pasal 12 & 13 mengatur standar sarpras (toilet, saluran air, TPS sampah, air bersih). Faktanya tidak terawat. Pasal 8 huruf a mewajibkan pasar bersih, sehat, nyaman. Tidak terpenuhi.

Fenomena 3 : Adanya praktik jual-beli hak sewa lapak disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pengelola pasar. Hak sewa yang seharusnya tidak boleh dipindahtangankan justru diperjualbelikan, hal ini menunjukkan kurangnya komitmen aparat dalam menegakkan aturan serta lemahnya integritas pelaksana dalam menjalankan tugas pengawasan. Di sisi lain, sebagian pedagang memilih jalan pintas dengan memperjualbelikan hak sewa, yang mencerminkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan. Akibatnya, harga lapak menjadi lebih tinggi daripada tarif resmi. (Sumber : Observasi di lapangan) Relevansi perda :

BAB V PEMANFAATAN PASAR DAERAH Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang menyewa toko, kios, los, lapak/tenda dan tempat MCK, ruang/lahan dilarang mengalihkan kepada pihak lain.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 22 Ayat (1)

Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, dan Pasal 21 atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan hak untuk menempati tempat berjualan oleh Dinas Pasar.

Kesimpulan : Pasal 18 melarang pengalihan hak sewa, tetapi dilanggar.
Pasal 22 memberi sanksi pencabutan hak, namun tidak ditegakkan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti yang didasarkan pada teori maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui kerangka pemikiran, penelitian diharapkan memiliki arah yang jelas dalam menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dalam penelitian ini, landasan utama yang digunakan adalah Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan penataan pasar daerah agar lebih tertib, berdaya saing, serta mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pedagang pasar.

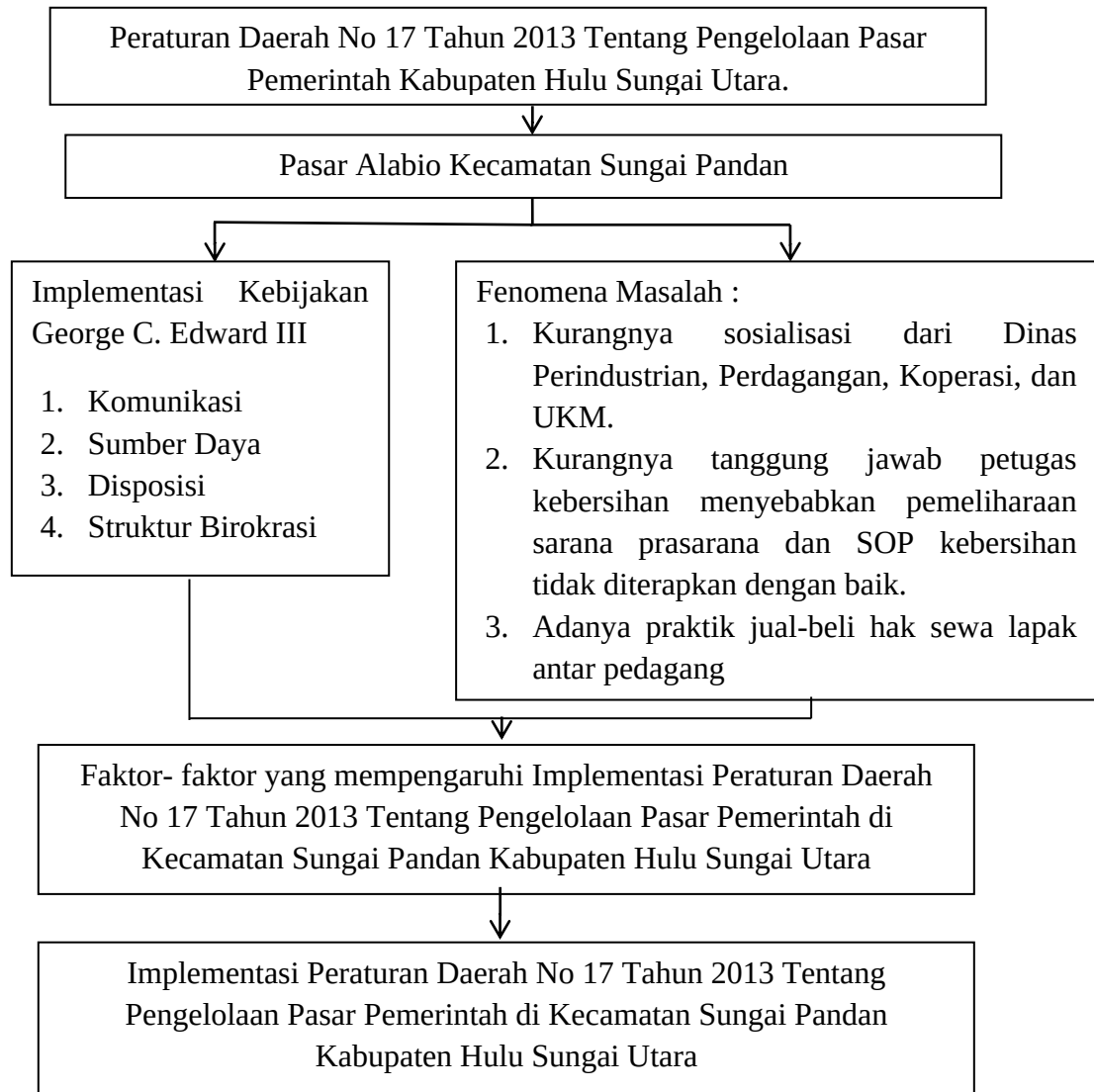
Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan Pasar Alabio di Desa Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan daerah dengan pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai

Utara. Agar pembahasan tidak melebar, maka disusun kerangka pemikiran yang berfungsi sebagai landasan teoritis.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah Pasar Alabio yang terletak di Jl Kesatuan Sungai Pandan, Desa Sungai Pandan Hulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kode Pos 71455 dan pada Dinas Perindistribustian Perdagangan Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) yang beralamat Jl. H. Murhan telp/fax. (0527) 61307 Kelurahan Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71417.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio)”.

Penelitian kualitatif menurut Bogdaan & Taylor dalam buku Imam Gunawan (2015:82) Adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Untuk itu, tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan metode kualitatif agar diperoleh data secara alamiah atau natural dan komprehensif yang sesuai dengan latar dan data yang diperoleh tidak merupakan hasil rekayasa atau manipulasi karena tidak ada unsur atau variabel lain yang mengontrol.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa yang dilakukan oleh manusia dengan lebih memperhatikan aspek karakteristik, keterkaitan antar kegiatan dan kualitas.

Metode penelitian deskriptif merupakan bagian dari salah satu metodologi yang digunakan oleh peneliti untuk berbagai penelitian yang sifatnya adalah mendeskripsikan hasil dari suatu penelitian. Jenis penelitian ini seringkali digunakan sebagai metode penelitian yang diperlukan oleh peneliti ketika mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian, yang kemudian dijabarkan dalam sebuah analisa untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. (Roosinda dkk (2021:40)

Menurut Sugiyono dalam buku Roosinda dkk (2021:29) Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis terhadap suatu hasil penelitian, tetapi digunakan untuk kesimpulandari hasil penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan subjek, situasi, perilaku ataupun fenomena, dimana digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, dimana, dan bagaimana yang terkait dengan masalah penelitian tertentu. Namun, penelitian deskriptif tidak untuk menjawab mengapa atau menemukan kesimpulan, atau membuat prediksi atau membangun hubungan sebab akibat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Purwanto,2022:56)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari peneliti lain atau dari catatan di instansi, atau dari mana saja sudah diolah, merupakan data sekunder. (Pasolog,2016:70)

2. Sumber Data

Sumber data yang dipilih yaitu purposive sampling dalam buku Harbani Pasolong (2016:107-108) Purposive Sampling adalah “suatu

teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi”. Penggunaan teknik ini senantiasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni peneliti harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.

Menurut Moleong dalam buku Ahmad Tohardi (2019:491)

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Kepala UPT Pasar	1
3	Staff UPT Pasar	1
4	Petugas Kebersihan	2
5	Pedagang	6
6	Pembeli	2
Total		13

E. Desain Operasional Penelitian

Dalam konteks spesifik Implementasi Peraturan Daerah, desain operasional menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi dan menguraikan indikator-indikator kunci yang akan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak dari implementasi Peraturan tersebut. Adapun yang menjadi indikator-indikator dari Implementasi Peraturan Daerah adalah:

Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40).

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub-Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam buku Reno Affrian (2023:38-40)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Kejelasan informasi c. Konsistensi informasi
	2. Sumber Daya	a. Sarana prasarana b. SDM pelaksana
	3. Disposisi	a. Komitmen aparat b. Integritas pelaksana
	4. Struktur birokrasi	a. Standar operasional prosedur b. Koordinasi antar tingkat c. Tingkat birokrasi

Sumber : Dibuat Peneliti 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.

1. Observasi

Menurut Young dan Schmidt dalam buku Harbani Pasolong (2016:131), observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkenaan tentang perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud adalah harus diberikan kepada unit kegiatan yang lebih besar atau lebih luas pada fenomena-fenomena khusus yang diamati terjadi.

Menurut Kurt Lewin dalam buku Harbani Pasolong (2016:131) Observasi adalah tentang perilaku sosial biasanya bernilai kecil jika tidak mencakup suatu gambaran yang cukup memadai tentang sifat dari kondisi sosial “*social atmosphere*” atau unit kegiatan yang lebih besar didalam kegiatan sosial khusus yang terjadi.

Nasution dalam buku Sugiyono (2021:490), menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang

yang diwawancara disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*). (Pasolog 2016:137)

Menurut Esterberg dalam buku sugiyono (2021:497), Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Susan Stainback dalam buku sugiyono (2021:498), mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Dokumentasi

Renier dalam buku Imam Gunawan (2015:175) Menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian (1) dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; (2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Sugiyono dalam buku Imam Gunawan (2015:176) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

Dokumen dapat disimpulkan merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. (Imam Gunawan 2015:178)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2023:130) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Menurut Susan Stainback dalam buku Sugiyono (2023:130) Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Miles and Huberman dalam buku Sugiyono (2022:369-375), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisisnya:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dapat diwujudkan dalam tema.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa perbandingan berbagai kategori dan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, dan hubungan struktural (hubungan jalur, ada variabel intervening satu atau lebih).

H. Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (2024:365) bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

1. Perpanjangan pengamatan

Mengapa dengan perpanjangan pengamatan akan dapat meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data? Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, di mana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari. *Rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people* (Susan Stainback dalam buku Sugiyono 2024:365-366)

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai contoh melihat sekelompok masyarakat yang sedang olah raga pagi. Bagi orang awam olahraga adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik. Tetapi

bagi peneliti kualitatif tentu akan lain kesimpulannya. Setelah peneliti mencermati secara mendalam, olahraga pagi itu bagi sekelompok masyarakat itu merupakan wahana untuk transaksi bisnis. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perdagangan narkoba, maka peneliti harus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan memahami bahasa-bahasa sandi mereka. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/tidak. (Sugiyono 2024:367-368)

3. Triangulasi

Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures (William Wiersma, 1986). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono 2024:368-371)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa di rata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang

dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknikd lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Mengapa dengan analisis kasus negatif akan dapat meningkatkan kredibilitas data? Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang betentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut. Sebagai contoh, bila ada 99% orang mengatakan bahwa si A, pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak (negatif). Dengan adanya kasus negatif ini, maka peneliti justru harus mencari tahu secara mendalam mengapa masih ada data yang berbeda. Peneliti harus menemukan kepastian apakah 1% kelompok yang menyatakan si A bukan pengedar narkoba itu betul atau tidak. Kalau akhirnya yang 1% kelompok menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian temuan penelitian menjadi lebih kredibel. (Sugiyono 2024:370)

5. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alatbantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya. (Sugiyono 2024:370-371)

6. Mengadakan Member check

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. (Sugiyono 2024:371)

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2013. *Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai
- Afrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media
- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ke-2. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Damayanti, Aza Rizki. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar Rejowinangun Kota Magelang*. Universitas Tidar: Tidak diterbitkan.
- Dewi, Dhea Chandra, dkk. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Elpisah. 2022. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Banyumas: Cv. Pena Persada
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara
- Iswahyudi, Muhammad Subhan. et al. 2023. *Manajemen Pemasaran (Strategi dan Praktek yang efektif)*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia
- Noor, Zulki Zulkifli. 2021. *Buku Referensi Strategi Pemasaran 5.0*. Yogyakarta: Deepublish
- Nurmayanti, Siti. et al. 2024. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Intelektual Manifes Media
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Asministrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Permana, Ipik. 2023. *Buku Ajar Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Pulungan, Muhammad Bahmid Effendi. et al. 2024. *Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka*. Medan: Umsu Press
- Pusrwanto, Amin. 2022. *Konsep dasar Penelitian Kualitatif : Teori dan Contoh Praktis*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

- Roosinda, Fitria Widiyani. et al. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing
- Saifuddin. 2018. *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: Deepublish
- Satriyawan, Aziz Nuri, Fatimatul Asroriah & Sumarno. 2024. *Implementasi Kurikulum Berbasis Pesantren*. Pasaman Barat: Cv. Azka Pustaka
- Sore, Uddin B & Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: Cv Sah Media
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2024. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suprayitno, Degdo. et al. 2024. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia
- Suradi. 2022. *Pemodelan Sistem (Sebuah Pengantar)*. Makassar: Cv. Tohar Media
- Syafriyani, Ida. 2023. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish Digital
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai
- Tjelin, Alexander Phuk. 2019. *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media
- Tohardi, Ahmad. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Untan Press
- Wajdi, Farid & Andryan. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wati, Mila, Sugiannor & Moh. Fajar Norrahman. 2025. Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol 2. No 1. hal 462-471.
- Zhaputera, Krisna Adhi Azhari. 2023. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai: Tidak diterbitkan.
- Zuriat, dkk. 2022. *Manajemen Rantai Pasok Produk Perikanan*. Banda Aceh: Bandar Publishing